

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Stakeholder Teori

Semua *stakeholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. Pada awalnya, pemegang saham sebagai satu-satunya stakeholder perusahaan. Pandangan ini di dasarkan pada argumen yang disampaikan Friedman (1962) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian, Freeman (2001) tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan (*adversarial group*) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Ghozali dan Chariri, 2007: 409).

Definisi *stakeholders* menurut Freeman (2001) merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders* (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghazali dan Chariri, 2007).

Stakeholder theory menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para *stakeholder* juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan (Deegan 2004). Perusahaan dianggap sebagai *stakeholders*, jika mempunyai tiga atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi dan kepentingan (Rudito, 2004) .

Stakeholders adalah semua pihak, internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Stakeholders* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemegang saham, pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa *stakeholder* adalah sistem secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya kompleks dan dinamis. Hal ini berlaku untuk kedua varian teori *stakeholder*. Varian pertama berhubungan langsung dengan model akuntabilitas.

Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya*.

commit to user

Sifat dari akuntabilitas itu ditentukan dengan hubungan antara stakeholder dan organisasi. Varian kedua teori stakeholder berhubungan dengan pandangan mengenai *empirical accountability*. Teori *stakeholder* mungkin digunakan dengan ketat dalam suatu organisasi arah terpusat (*centered-way organization*). Diungkapkan bahwa lingkungan sosial perusahaan merupakan sarana sukses bagi perusahaan untuk menegosiasikan hubungan dengan stakeholdernya.

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan beroperasi bukan untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada *stakeholder*-nya. Oleh karena itu salah satu manfaat yang bisa diperoleh oleh para *stakeholders* adalah informasi kinerja keuangan perusahaan. Adanya informasi kinerja keuangan perusahaan bagi *stakeholder* sangat bermanfaat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mengacu pada pengertian *stakeholder* di atas, maka dapat ditarik suatu penjelasan bahwa dalam suatu aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam, yang kesemuanya dapat disebut sebagai *stakeholders*.

Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya (Ghazali dan Chariri, 2007).

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Ghazali dan Chariri, 2007).

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak ini dapat meliputi investor dan pihak-pihak non investor seperti pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat sekitar, dan pemerintah (Robbins dan Coulter, 2007). Berdasarkan teori ini, perusahaan memiliki kontrak dengan *stakeholder*-nya. Dengan demikian, *stakeholders* memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, perusahaan berhadapan dengan banyak *stakeholders*. Untuk mempertahankan eksistensinya perusahaan memerlukan dukungan *stakeholders* sehingga aktivitas perusahaan harus mempertimbangkan persetujuan dari *stakeholders*. Semakin kuat *stakeholders*, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan *stakeholder*. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan memilih untuk menanggapi banyak tuntutan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*),

yaitu setiap kelompok dalam lingkungan luar organisasi yang terkena tindakan dan keputusan organisasi. Diharapkan dengan memenuhi tuntutan para stakeholder dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan asumsi *stakeholder theory*, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha (kinerja) dan jaminan *going concern*.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan lembaga lainnya. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Keberadaan investor institusi ini dapat memperkuat pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan.

Kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi upaya perusahaan dalam menentukan cara mengawasi manajer yang lebih efektif dalam mengambil setiap keputusan. Hal ini dikarenakan investor institusional ikut

dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga sulit bagi manajer untuk dapat bertindak di luar mandate yang telah diberikan oleh pihak pemegang saham. Jadi pengawasan terhadap perusahaan tidak hanya terbatas dilakukan oleh pihak dalam perusahaan, namun juga dapat dilakukan dari pihak eksternal perusahaan yaitu dengan adanya pengawasan melalui investor-investor institusional.

Kepemilikan institusional dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham oleh institusi dengan seluruh saham. Menurut Mahaputeri dan Yadnyana (2014) kepemilikan institusional dapat diukur dengan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi terhadap total saham yang beredar. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar pengawasan kepada pihak manajemen sehingga menghindari perilaku opportunistic manajer. Dengan adanya kepemilikan institusional untuk mengawasi manajemen agar melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Institusi akan memantau secara profesional terhadap perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga dapat memperkecil kemungkinan manajer bertindak di luar tanggung-jawabnya.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dengan demikian, dewan komisaris merupakan pusat ketahanan

dan kesuksesan perusahaan. (Egon Zehnder International dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2007).

Menurut UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Pasal 98 UUPM menegaskan, bahwa dewan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Disamping itu UUPM juga menetapkan, bahwa orang yang dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya sebagai anggota dewan komisaris.

Djuitaningsih (2012) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang lebih besar dipandang sebagai variabel ketiga adalah komite audit. Komite audit berfungsi untuk melaksanakan pengawasan internal perusahaan atas pelaksanaan audit, manajemen risiko, proses pelaporan keuangan, dan implementasi *Corporate Governance* di perusahaan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh komite audit diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

a. Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki beberapa tugas, menurut Organisation For Economic Co-Operation And Development atau OECD (2004) tugas-tugas utama dewan komisaris meliputi:

- 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;
- 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil;
- 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
- 4) Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan jika perlu;
- 5) Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Lingkup tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota komisaris secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No1 tahun 1995, khususnya Pasal 94 sd Pasal 101. Dalam Undang-Undang

tersebut tidak dipisahkan peran khusus dari Komisaris Independen. Dalam Undang-Undang tersebut diberi keleluasaan masing-masing perusahaan mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan syarat-syarat dan tanggung jawab keanggotaan dewan komisaris secara lebih rinci sesuai dengan rujukan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Perusahaan. Untuk beberapa perusahaan, ketentuan persyaratan keanggotaan Dewan Komisaris dapat diatur lebih lanjut dalam Manual GCG.

b. Fungsi Dewan Komisaris

Fungsi dewan komisaris termasuk anggota komisaris independen menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2007) mencakup dua peran sebagai berikut:

- 1) Mengawasi Direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan nasehat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.
- 2) Memantau penerapan dan efektivitas dari praktik GCG.

Agar fungsi dan tugas dewan komisaris ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu dipastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dewan komisaris yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan dewan direksi sebagai agen atau bias dengan kepentingan pemilik. Dalam hal ini komisaris independen dapat berperan dalam untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Dalam kaitannya dengan upaya menjalankan *good corporate governance* di perusahaan, seluruh anggota komisaris atau komisaris independen perlu mengerti dan menjalankan tugasnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good corporate governance* berikut ini:

- 1) *Transparansi*, yang menunjukkan kemampuan dari berbagai pihak pemegang kepentingan terkait untuk melihat dan memahami proses dan acuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan. Disini perlu dibangun berbagai sistem prosedur yang baku untuk ditaati dalam proses pengambilan keputusan. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan azas ini mencakup antara lain penunjukan komisaris dan direksi, remunerasi komisaris dan direksi, kinerja komisaris dan direksi, hubungan dengan pihak eksternal, transaksi dengan pihak ketiga, dan penunjukan auditor.
- 2) *Disclosure*, yang merupakan penyajian informasi kepada berbagai pihak pemegang kepentingan mengenai berbagai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan. Pada tahap awal menerima tugas pekerjaannya, dewan komisaris dan dewan direksi perlu memastikan bahwa eksternal auditor, internal auditor dan komite audit mempunyai akses terhadap informasi yang dimiliki perusahaan, dengan syarat kerahasiaan informasi perusahaan ini tetap dijaga. Kemudian, pada tahap berikutnya, dewan direksi perlu menyampaikan laporan keuangan audited dan kinerja usaha kepada publik secara rutin (RUPS, lembaga bursa, public expose, berita surat kabar). Dewan

komisaris dan dewan direksi perlu memberikan laporan *corporate governance* kepada pihak pemerintah atau badan pengawas eksternal (Bank Indonesia, Bapepam, Kantor Meneg BUMN). Perusahaan perlu juga menyampaikan pada publik sejauh mana tingkat kepatuhan telah mereka jalankan, yang meliputi ketaatan pada peraturan dan Undang-undang yang berlaku, arahan pemerintah, peraturan perpajakan, prosedur standar akuntansi serta standar operasional lainnya.

- 3) Akuntabilitas, yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dewan komisaris dan dewan direksi atas keputusan manajerial dan hasil kinerja usaha yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Dewan komisaris dan dewan direksi perlu menyampaikan laporan realisasi pencapaian kinerja usahanya dikaitkan dengan pencapaian target-target usaha yang ditetapkan dalam *business plan* dan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara rutin dan tepat waktu kepada publik. Bahkan untuk beberapa perusahaan laporan keuangan dan kegiatan operasional disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris secara rutin dalam laporan semesteran, triwulanan, atau bulanan.
- 4) Kemandirian, yang menuntut pemilik perusahaan, dewan komisaris dan dewan direksi dalam menjalankan kegiatan usaha melepaskan diri dari berbagai pengaruh atau tekanan yang berasal dari pihak tertentu yang dapat mengganggu, merugikan, atau mengurangi obyektivitas pengambilan keputusan. Praktik-praktik kemandirian dapat meliputi kriteria seleksi

anggota komisaris dan anggota direksi, akses terhadap pendapat konsultan independen, proses alokasi kredit, proses lelang, dan proses audit.

- 5) Keadilan, yang menjamin terselenggaranya perlakuan adil pada para pihak pemegang kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Di samping perlakuan adil ini diberikan kepada pihak tersebut diatas, maka perlu dijamin hal serupa akan diberikan pada karyawan dan pegawai perusahaan serta kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar perusahaan. Beberapa perusahaan besar seperti halnya Citibank, Kelompok Sampoerna, Coca-Cola dan Unilever bahkan telah menjalankan berbagai bentuk *social responsibility programs* atau *community development* yang dirasakan manfaatnya oleh kalangan eksternal di luar perusahaan.

4. Komite Audit

Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit juga berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016). Berdasarkan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif (KNKG, 2002) tentang komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

commit to user

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
- c. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit;
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kelayakan dan objektivitas laporan keuangan perusahaan.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

- a. Laporan Keuangan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang.

- b. Pengawasan Perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.

- c. Tata Kelola Perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan

kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang (Pohan, 2008 dalam Diantari dan Ulupui, 2016). Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa anggota komite audit harus: (a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; (b) Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan; (c) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan; (d) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Komite audit yang memiliki keahlian memadai, pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan kecurangan dapat diminimalisasi. Komite audit dapat diproksikan dengan jumlah rapat yang dilakukan komite audit dan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

5. Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai *“performing measurement”*, yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan

commit to user

untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2007). Sedangkan menurut Sutrisno (2009) kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Pengertian lain mengenai kinerja keuangan dikemukakan oleh Fahmi (2012) yang mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana sebuah perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Sedangkan menurut Jumingan (2006) kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Menurut Fahmi (2011), kinerja keuangan perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Oleh sebab itu penilaian kinerja akan membantu perusahaan dalam menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, sehingga dapat dijadikan salah satu pedoman dalam pengambilan keputusan-keputusan yang akan datang.

Menurut Samsul (2006: 200-204) ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. faktor-faktor tersebut adalah faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro yaitu tingkat bunga umum

domestik, tingkat inflasi, peraturan perpajakan, kebijakan khusus pemerintah yang terkait dengan perusahaan tertentu, kurs valuta asing, tingkat bunga pinjaman luar negeri, kondisi perekonomian internasional, siklus ekonomi, paham ekonomi dan peredaran uang. Faktor mikro adalah faktor yang mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan yang berada dalam perusahaan itu sendiri. Faktor tersebut meliputi variabel-variabel yaitu laba bersih per saham, laba usaha per saham, nilai buku per saham, rasio ekuitas terhadap utang, rasio laba bersih terhadap ekuitas dan cash flow perusahaan.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengukur kinerja keuangan perusahaan menggunakan *Return On Equity* (ROE). Kasmir (2011) menyatakan bahwa hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih.

Brigham dan Houston (2015) menyatakan bahwa ROE merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa *return on equity* digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Sedangkan menurut Syamsuddin (2007) *return on equity* adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya tingkat pendapatan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Pendapat lain yang kurang lebih

sama dipaparkan oleh Harahap (2015) yang menyatakan bahwa ROE merupakan rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik.

Azarbaijani, Soroushyar, Kopaei (2011) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja keuangan telah dibahas sebagai prioritas utama dalam semua pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan publik dan perusahaan swasta untuk mengidentifikasi lokasi dan area yang sulit. Pengukuran kinerja keuangan didasarkan pada banyak keputusan tersebut sebagai kompensasi eksekutif, harga saham, risiko stok, keputusan terkait untuk investasi, dan banyak kasus lainnya. Salah satu tugas utama manajer adalah pengambilan keputusan, mereka harus memutuskan untuk merencanakan, mengatur aktivitas perusahaan. Keputusan ini harus didasarkan pada kriteria kinerja dan indikator sesuai dengan operasi organisasi (dalam Chashmi, dan Fadaee, 2016).

Raza, (2011) memaparkan bahwa sektor keuangan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi melalui penyaluran dana, memberikan kecakapan sistem keuangan, perlakuan investor yang ramah, dan pemanfaatan sumber daya yang optimal (Shah dan Jan, 2014).

Analisis kinerja keuangan adalah proses penentuan karakteristik operasi dan keuangan perusahaan dari laporan keuangan dan akuntansi. Kemampuan seorang organisasi untuk menganalisis posisi keuangan sangat penting untuk meningkatkan posisi kompetitifnya di pasar. Melalui analisis yang cermat terhadap kinerja keuangannya, organisasi dapat mengidentifikasi

peluang untuk meningkatkan kinerja tingkat departemen, unit atau organisasi. (Pandian dan Narendran, 2015).

M. Ganga. P. Kalaiselvan, R. Suriya. (2015), mengungkapkan bahwa fokus analisis keuangan adalah kunci angka dalam laporan keuangan dan hubungan signifikan yang ada di antara mereka. Analisis laporan keuangan merupakan proses dari evaluasi hubungan antara bagian-bagian komponen laporan keuangan untuk mendapatkan yang lebih baik memahami posisi perusahaan dan performance. Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam (Jumingan, 2006), yaitu :

- a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
- b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- c. Analisis Persentase per Komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
- d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.

- e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
- f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
- g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
- h. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Pengukuran kinerja adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. Menurut Munawir (2002) pengukuran kinerja keuangan memiliki beberapa tujuan yaitu, untuk:

- a. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
- b. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuiditasi, yang mencakup baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.
- c. Mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu.

- d. Mengetahui stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.

Dengan tujuan tersebut, penilaian kinerja keuangan memiliki beberapa peranan bagi perusahaan. Penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengukur tingkat biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan berbagai kegiatan, untuk mengukur efisiensi proses produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan, untuk menilai dan mengukur hasil kerja pada tiap-tiap bagian individu yang telah diberikan wewenang dan tanggungjawab, serta untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Penilaian kinerja setiap perusahaan tergantung ruang lingkup bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Menurut Fahmi (2013) ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:

- a. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan

Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Melakukan Perhitungan

Penerapan metode perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Metode yang paling umum digunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:

- 1) *Times series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan nantinya akan terlihat secara grafik.
- 2) *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Penggunaan kedua metode ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.

d. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan .

Tahap ini dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan perusahaan setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran

untuk melihat permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan.

- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

B. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan beberapa penelitian terdahulu, maka dibuat suatu rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perhotelan Di Lima Negara ASEAN

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko, 2007). Dalam kepemilikan institusional ini, *stakeholder* juga bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan itu. Keberadaan investor institusional mampu menjadi mekanisme monitoring efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Penerapan kepemilikan insitusional mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan, termasuk di dalamnya adalah para pemegang saham. Pemegang saham dapat berperan sebagai penentu kebijakan terkait dengan kinerja keuangan. Dalam penelitian Djoko Suhardjanto (2017) disebutkan bahwa peran pemegang saham dalam suatu perusahaan menjadi lebih penting dalam menentukan kebijakan dalam mencapai kinerja keuangan.

Samasta, Muharam, Haryanto (2018) menunjukkan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia dan kepemilikan institusional

berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia.

Yoselinda Avelia dan Josua Tarigan (2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa adanya *institutional ownership* dalam perusahaan mempengaruhi *intellectual capital*. *Intellectual capital* merupakan asset penting bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan *financial performance* perusahaan. *Institutional ownership* dapat memantau keputusan manajemen sehingga *financial performance* menjadi lebih baik. Penelitian ini memiliki keterbatasan sampel hanya terbatas pada perusahaan retail dan jasa.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perhotelan Di Lima Negara ASEAN

Dewan komisaris independen berperan penting bagi perusahaan, karena dapat mencegah adanya tindak manajemen yang tidak transparan. Adanya dewan komisaris independen maka kepentingan *stakeholder*, baik mayoritas maupun minoritas tidak diabaikan karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh manajer. Artinya Dewan komisaris memiliki peran penting terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sukmono (2015) dimana menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan melalui kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Zabri, Ahmad, dan Wah (2016) dan Abubakar (2016) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris yang diukur dengan karakteristik dan aktivitas Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian Amran (2011); Bin dan Yi

(2015); dan Tachiwou (2016) melalui mekanisme CG, dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Apollo, Mandalika, Said Djamaluddin (2018) menemukan bahwa variabel Direksi dan Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity*; Audit Komite berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity*.

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perhotelan Di Lima Negara ASEAN

Komite audit sangat penting bagi perusahaan, khususnya perhotelan. Komite audit diperlukan perusahaan dalam kapasitasnya dapat mengawasi serta melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Samasta, Muharam, Haryanto (2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia.

Untari dan Santosa (2015) menunjukkan hasil bahwa komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan yang lainnya tidak. Sedangkan hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan semua mekanisme GCG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

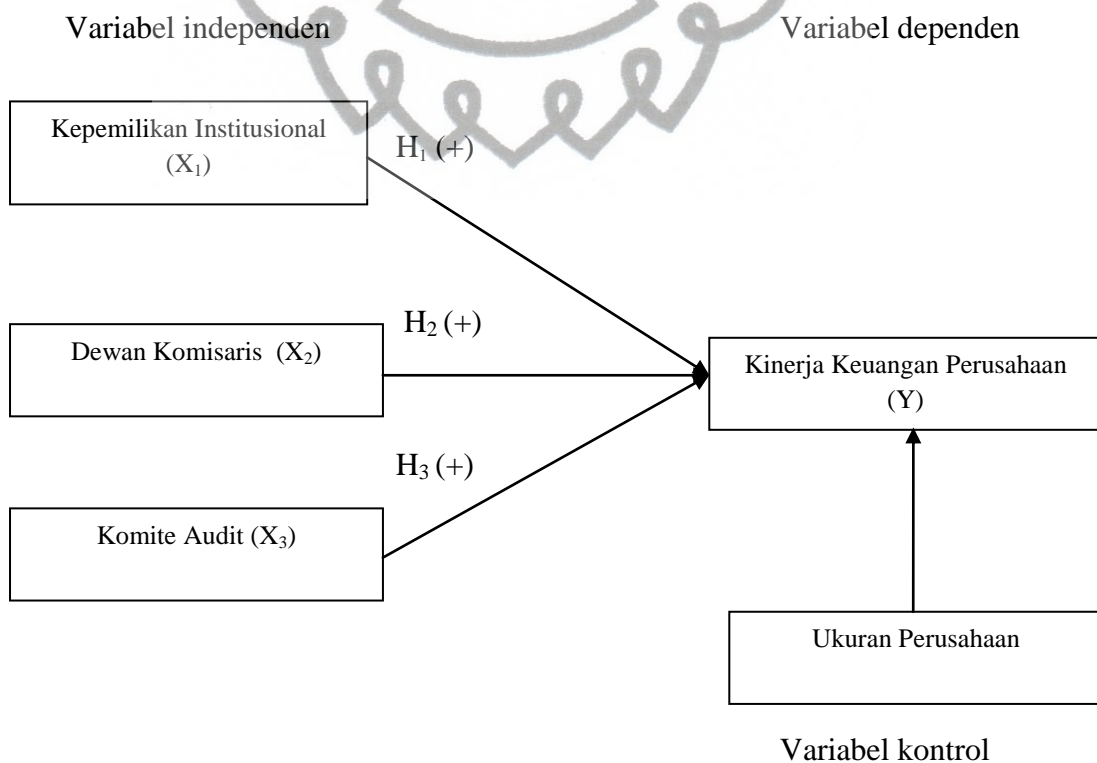
Penelitian lain yang dilakukan Rusli, Nainggolan, dan Pangestu, (2020), menunjukkan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan komite audit lainnya tidak

berpengaruh signifikan. Sedangkan hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan semua mekanisme GCG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Andriana dan Panggabean (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jumlah dan kualitas komite audit yang kemungkinan tidak mumpuni, hal ini menyebabkan rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Persoalan ini diduga mengakibatkan ukuran komite audit dianggap tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan hipotesis di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar kerangka berpikir di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini mengambil variabel independen yaitu dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusi, yang berpengaruh terhadap variable dependent, yaitu kinerja keuangan perusahaan perhotelan di lima negara ASEAN (Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Srilanka). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *stakeholders* terhadap kinerja keuangan perusahaan hotel yang diukur menggunakan *return on equity* (ROE). ROE merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dan ekuitas. Semakin besar hasil ROE maka kinerja keuangan perusahaan semakin baik.